

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PEMERINTAH TERHADAP
PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LUWOO
KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN
GORONTALO**

**Oleh:
MUZDALIFAH ADNAN
NIM: S.21.21.051**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

OLEH :

MUZDALIFAH ADNAN

NIM:S2121051

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana

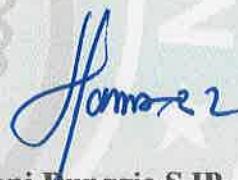
Telah di setujui oleh Tim Pembimbng Pada Tanggal,08 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN :0913027101



Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN: 0930048307

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN: 0930048307

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

OLEH :

MUZDALIFAH ADNAN

NIM: S2121051

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 10 Mei 2025 Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, S.IP., S.E., S.Psi., MM
2. Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd
3. Purwanto, S.IP., M.Si
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si

: 
: 
: 
: 
: 

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muzdalifah adnan

Nim : S2121051

Konsentrasi : Manajemen Pemerintah Daerah

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang Berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo" adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skipsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Gorontalo, Mei 2025



Muzdalifah adnan

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di perbuatnya” (QS. Albaqarah:286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses .Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu.Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan,mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” (Boy candra)

“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa.”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan,Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suleman Adnan dan Ibu Monirce Alimun A.Md.AK yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk kedua saudara kandung saya Miftahul Jannah Adnan S.I.Kom dan Sitti Magfira Adnan,saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini.

Diri saya sendiri, Muzdalifah Adnan S.IP karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini.mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Sahabat dan teman-teman saya Nurcahyani Luly S.IP yang telah menemani dalam suka maupun duka.

ABSTRACT

MUZDALIFAH ADNAN. S2121051. THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND GOVERNMENT TRANSPARENCY ON VILLAGE FUND UTILIZATION IN LUWOO VILLAGE, TELAGA JAYA SUBDISTRICT, GORONTALO REGENCY

This study aims to find the effect of accountability and government transparency on village fund utilization in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, Gorontalo Regency. This study employs a quantitative approach with a survey method. The sample size in this study covers 43 people. The data analysis technique used is simple linear regression analysis. The findings indicate that the effect of accountability (X1) and government transparency (X2) on village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, Gorontalo Regency is 0.673 (67.3%), and the remaining at 0.327 (32.7%) is affected by other variables outside this study. The effect of accountability (X1) on village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, Gorontalo Regency, is 0.619, and government transparency (X2) affects village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict at 2.438. It means that the variable of government transparency (X2) has the most dominant effect on village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, compared to accountability.

Keywords: accountability, government transparency, village fund utilization

ABSTRAK

MUZDALIFAH ADNAN. NIM: S.21.21.051. PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap penggunaan dana desa di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 orang. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,673 atau 67,3%, adapun sebesar 0,327 atau 32,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,619, sedangkan pengaruh transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, yakni sebesar 2,438. Hal ini berarti bahwa transparansi pemerintah (X2) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, dibanding pengaruh akuntabilitas.

Kata kunci: akuntabilitas; transparansi pemerintah; penggunaan dana desa

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Ichsan Gorontalo dan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis tunjukan kepada: Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo; Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Ichsan Gorontalo, dan sebagai pembimbing pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama pembuatan skripsi ini; Ibu Swastiani Dunggio, S.I.P, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus dosen pembimbing yang telah mendidik dan memberikan arahan ataupun bimbingan dalam penyusunan skripsi ini; Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis; Teristimewa kedua orangtua

tercinta, Nonirce Alimun, A.Md. AK dan Suleman Adnan yang selalu mencerahkan kasih sayang dan kesabarannya dalam merawat, mendidik, serta mendoakan penulis dengan tulus dan ikhlas; serta Teman-Teman dan Sahabat yang masih berjalan beriringan bersama penulis sampai dengan saat ini.

Dalam hal ini penulis merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang. Semoga segala upaya yang tertuang dalam skripsi ini mendapatkan ridho dan kelancaran dalam pelaksanaanya

Gorontalo, 24 April 2025

Penulis

Muzdalifah Adnan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas	8
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	8
2.1.2 Indikator Akuntabilitas.....	9
2.1.3 Jenis Akuntabilitas	11
2.1.4 Tipe Akuntabilitas	13
2.2 Pengertian Transparansi.....	14
2.2.1 Indikator Transparansi	16
2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi	18
2.3 Penggunaan Dana Desa.....	19
2.3.1 Pengertian Penggunaan Dana Desa.....	19
2.3.2 Konsep Desa.....	20
2.3.3 Indikator Penggunaan Dana Desa	21
2.4 Hubungan Antara Akuntabilitas Terhadap Penggunaan Dana Desa	24
2.4.1 Hubungan Antara Transparansi Terhadap Penggunaan Dana Desa... ..	25
2.4.2 Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Dana Desa	25
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu.....	26
2.6 Kerangka Pikir	28

2.7 Hipotesis	27
---------------------	----

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian.....	30
3.2 Metode Penelitian	30
3.2.1 DesainPenelitian	30
3.2.2 Operasional Variabel.....	31
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Prosedur Penelitian	37
3.6.1 Uji Validitas	38
3.6.2 Uji Reliabilitas	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Luwoo	42
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Luwoo	43
4.1.3 Tugas pokok	44
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner	46
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner.....	47
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
4.3.1 Deskripsi variabel akuntabilitas (X1).....	48
4.3.2 Deskripsi variabel transparansi pemerintah (X2).....	51
4.3.3 Deskripsi variabel penggunaan dana desa (Y)	54
4.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	58
4.4.1. Pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.....	62
4.4.2 Pengaruh Transparasi Pemerintah (X2) Terhadap Penggunaan Dana Desa (Y) di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo	63
4.5 Pembahasan.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	70
Saran	71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel X1, X2 dan Y	31
Tabel 3.2 Bobot nilai variabel.....	36
Tabel 3.3 Interpretasi koefisien.....	39
Tabel 4.1 Hasil uji validitas akuntabilitas (X1), transparansi pemerintah (X2), dan penggunaan dana desa (Y).....	46
Tabel 4.2 Hasil uji reliabilitas akuntabilitas (X1), transparansi pemerintah (X2), dan penggunaan dana desa (Y).....	47
Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang akuntabilitas (X1)	48
Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang transparansi pemerintah (X2).....	51
Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang penggunaan dana desa (Y).....	54
Tabel 4.6 Tabel anova akuntabilitas (X1), transparansi pemerintah (X2) dan penggunaan dana desa (Y).....	59
Tabel 4.7 Model summary pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y)	60
Tabel 4.8 Coefficients correlations variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y)	61

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Bagan kerangka pikir	29
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No 6 tahun 2014 menggambarkan keberadaan desa secara hukum sebagai unit komunitas hukum dengan perbatasan regional yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mendukung operasi pemerintah. Republik Indonesia (NKRI) adalah inisiatif, hak atas asal, atau sayap kanan dari tradisional, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara bersatu pemerintah. Oleh karena itu, peraturan desa atau desa memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola desa untuk kepentingan masyarakat.

Desa adalah kisaran terkecil pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, peraturan desa memainkan peran penting dalam pembangunan. Jika semua pengembangan desa dapat diimplementasikan secara optimal, tujuan pemerintah pusat adalah untuk mencapai sumur yang adil dan pengembangan yang adil. Namun, kondisi di beberapa wilayah Indonesia tidak memenuhi harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah untuk otonomi lokal sangat penting karena desa memiliki hak untuk kebebasan untuk menetapkan peraturan dan peraturan dalam kehidupan desa.

Untuk memeratakan dan mempercepat pembangunan di daerah, pemerintah sejak tahun 2015, dengan jumlah anggrana sebesar 20,76 triliun rupiah. Dana desa merupakan salah satu wujud pengakuan negara terhadap desa. Aziz (2016:22) mengemukakan bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila

penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Tingkat penyerapan dana desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi telah rutin menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang selaras dengan prioritas nasional.

Desa Luwoo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yang memiliki empat dusun. Tugas dari desa yaitu memiliki kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam mengoptimalkan potensi desa, pemerintah desa menggunakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa dilakukan untuk pembangunan desa yang sangat penting untuk dilakukan karena akan menjadi desa berkembang dan lebih maju, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan kawasan perkotaan. Kesiapan ditingkat pemerintah kabupaten diukur dari tersedianya payung hukum terkait dengan pengelolaan dana desa, serta dukungan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu kesiapan pemerintah desa diukur dari kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi peraturan yang ada terkait dengan pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan dana desa pada program pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Luwoo, yaitu rehabilitasi gedung TK, dan posyandu. Sementara dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu program UMKM, santunan untuk lansia dan bantuan beasiswa. UMKM menjadi salah satu pilar utama bagi ekonomi negara. UMKM berperan penting dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada rakyat dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas jangkauan ekonomi rakyat serta memberikan kontribusi berarti dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan terhadap krisis moneter. Masalah dalam proses pembangunan terkait pemanfaatan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa contohnya perubahan harga, serta keterbatasan dana, kemudian penentuan pihak ketiga yang mau bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pengadaan barang dan jasa, proses administrasi, serta SDM yang ikut dalam program kegiatan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Febriyanto Adjidji (Rabu, 30 Oktober 2024) salah satu warga mengatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi kendala dalam proses tersebut, yaitu pada pembahasan penentuan penerima manfaat (KPM) dikarenakan sangat terbatas dan diwajibkan harus sama rata dan adil, sebagian besar pelaku UMKM juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha mereka dengan terbatasnya akses modal, pengetahuan, dan sumber daya. Solusi peran pemerintah desa untuk program rehabilitasi posyandu untuk selalu menghimbau dan mengajak masyarakat untuk senantiasa ikut serta dalam kegiatan posyandu sementara dalam pemberdayaan masyarakat

peran pemerintah desa dalam UMKM dilakukan sosialisasi dengan mengedukasi masyarakat terkait keterbatasan dana.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam mengatur serta mengelola dana desa ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, yakni menyangkut akuntabilitas belum dipahami masyarakat. Demikian halnya dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk berkomunikasi atau menanggapi akuntabilitas, dan untuk menjelaskan kinerja dan perilaku seseorang, perusahaan hukum, atau perusahaan kolektif dalam organisasi yang memiliki hak atau wewenang untuk mencari informasi atau akuntabilitas. Sehubungan dengan kebijakan penggunaan preferensi desa, prinsip -prinsip dasar harus didasarkan pada pengelolaan dana desa pada standar lokal di bidang pembangunan dan penguatan komunitas desa. Masalah muncul sehubungan dengan pengelolaan gundukan desa yang tidak direncanakan dengan tepat. Partisipasi masyarakat adalah indikator kunci dari proses pengambilan keputusan. Demikian halnya terkait laporan keuangan dana desa yang sering diabaikan oleh pengelola dana desa. Hasil penelitian Temalagi dan Anakotta (2021) menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, Temalagi dan Anakotta (2021:52) mengatakan bahwa suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa. Demikian halnya dengan transparansi serta partisipasi masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya (Permatasari, Hasan dan Sopanah, 2018). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan dana desa tersebut. Pengelolaan dana desa memang dalam berbagai penelitian diatas memiliki permasalahan yang berkaitan dengan peran aktif masyarakat. Masyarakat memiliki andil dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan alokasi dana desa.

Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang baik akan mendukung progress pembangunan desa melalui kebijakan dana desa tersebut .kebijakan yang berpadu dengan akuntabilitas dan transparansi akan menentukan pembangunan di daerah pinggiran yaitu desa. Pemerintahan desa memiliki peran yang krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi unsur kunci yang mendukung efektivitas pengelolaan dana desa desa luwoo, yang terletak di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, menjadi fokus perhatian untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa. Sebagai sektor pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat, keberhasilan desa Luwoo dalam mengelola dana desa dapat memberikan gambaran nyata tentang dampak positif akuntabilitas dan transparansi terhadap pembangunan lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi**

Pemerintah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merumuskan suatu masalah yaitu seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap penggunaan dana desa di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap penggunaan dana desa di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep dan kerangka kerja teoritis yang mendasari akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan.

3. Manfaat untuk peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan dana desa, dan juga merupakan perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Menurut Mardiasmo (2009:18), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Nasirah (2016:24), tugas akuntabilitas juga merupakan alat kegiatan kontrol, terutama ketika mencapai hasil dalam hal ini diperlukan penilaian hasil yang telah dicapai untuk mendapatkan informasi terkait capaian hasil dan strategi yang diambil untuk mencapainya.

Menurut Herlianto (2017: 7), "bertanggung jawab atas kewajiban pemerintah untuk menjelaskan pengelolaan keuangan sesuai dengan mandat dan sarana kepercayaan." Menurut Bastian (2010:385), akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk mengkomunikasikan akuntansi atau menjawab layanan dan tindakan seseorang atau perusahaan hukum, dan secara kolektif pimpin kepada

mereka yang memiliki hak atau wewenang untuk ditanyakan tindakan, informasi atau akuntabilitas.

Menurut Bastian (2010), kewajiban untuk menjawab kinerja dan tindakan pembentukan individu/hukum adalah pendirian hukum manajer atau organisasi kolektif.

Akuntabilitas didasarkan pada definisi mendorong kewajiban untuk melayani sesuai dengan hukum atau mempromosikan pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan manajemen keuangan atau informasi.

1. Akuntabilitas vertikal adalah tanggung jawab manajemen untuk otoritas yang lebih tinggi, seperti unit kerja sama kepada pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat dibandingkan dengan MPR.
2. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.2 Indikator Akuntabilitas

Mahmudi (2010:16) menerangkan bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja serta mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan

dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

2. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan juga efisien. Akuntabilitas manajerial juga terkait dengan akuntabilitas proses yang artinya proses organisasi harus bisa dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi.
3. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus dipertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. dengan kata lain akuntabilitas program yang berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi.
4. Lembaga publik harus dapat mempertimbangkan pedoman akun yang ditentukan dengan memeriksa efektivitas di masa depan. Saat membuat pedoman, harus mempertimbangkan tujuan pedoman dan mempertimbangkan alasan mengapa pedoman dicatat, target manfaat yang akan terpengaruh, dan \manfaat dan efek (negasi) dalam mempertahankan pedoman.

5. Akuntabilitas ekonomi adalah akuntabilitas ekonomi, efektif dan efisien dari lembaga nasional. Tidak ada limbah dan kecerobohan uang dan korupsi. Akuntabilitas keuangan untuk anggaran dan skala keuangan sangat penting. Kewajiban Akuntansi Keuangan adalah perhatian utama masyarakat umum,

Menurut Yango dalam Safroni (2017:142), indikator akuntabilitas dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas tradisional/regular, yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap peraturan-peraturan terkait bidang fiskal dan administrasi publik guna mengukur efisiensi dan kualitas pelayanan.
- b. Akuntabilitas manajerial, yang menitikberatkan pada aspek manajerial yang menyangkut efisiensi dalam menggunakan anggaran, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.
- c. Akuntabilitas program, yang menitikberatkan pada pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup tugasnya.
- d. Akuntabilitas proses, yang menitikberatkan pada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dari setiap pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi faktor etika dan moral dalam proses pelaksanaannya.

2.1.3 Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang transparan dan demokratis dan keberadaan kebebasan di atmosfer dan ekspresi

pendapat. Pentingnya akuntabilitas sebagai komponen kunci dari pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai kategori akuntabilitas. Penjadwal dan Plano (Manggaukang Raba 2006:10) membedakan mereka. Yaitu, ada lima jenis akuntabilitas:

- a) Akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana publik.
- b) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum.
- c) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
- d) Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.
- e) Akuntabilitas Outcome- tanggungjawab atas hasil.

Sheila Elwood (dalam Manggaukang Raba, 2006:35) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu:

- a) Akuntabilitas untuk undang -undang dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap undang -undang dan peraturan lain yang diperlukan saat menggunakan dana publik. Untuk memastikan bahwa jenis implementasi akuntabilitas ini harus dilakukan oleh audit kepatuhan.
- b) Tanggung jawab proses, yaitu akuntabilitas untuk prosedur untuk melakukan tugas, apakah itu cukup? Jenis akuntabilitas ini dapat dicapai dengan menyediakan layanan cepat, cepat, berbiaya rendah dengan respons cepat.

- c) Tanggung jawab program, yaitu, tugas untuk menjelaskan sehubungan dengan keseimbangan, apakah tujuan tertentu dapat dicapai dengan tepat atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya terendah.
- d) Pedoman tentang kewajiban akuntansi, yaitu, penjelasan akuntabilitas mengenai akuntabilitas pemerintah daerah di DPRD sebagai anggota parlemen dan masyarakat yang lebih luas. Ini berarti bahwa pedoman membutuhkan transparansi sehingga masyarakat dapat melakukan ulasan dan pengawasan dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Tipe Akuntabilitas

Tipe akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu:

1. Akuntabilitas internal

Pemerintah diharuskan kapan saja untuk setiap pegawai negeri/pegawai negeri sipil untuk secara berkala baik individu/kelompok dan setiap kali selebaran dianggap perlu untuk pengembangan kinerja/implementasi hasil. Kegiatan harus mempertimbangkan implementasi kegiatan mereka. Kebutuhan akan akuntabilitas internal untuk pemerintah ditentukan dalam pemimpin 1999 No. 7 sehubungan dengan tanggung jawab atas kepentingan lembaga pemerintah.

2. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada semua lembaga negara sebagai organisasi untuk mempertimbangkan semua misi yang diterima dan diimplementasikan atau dikembangkan untuk berkomunikasi dari pihak luar dan lingkungannya.

2.2. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo (2010:30), transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang kegiatan untuk manajemen sumber daya publik bagi mereka yang membutuhkan. Transparansi informasi, terutama informasi keuangan dan keuangan, harus diterapkan dalam format yang relevan dan sederhana. Transparansi diperoleh ketika ada kejelasan tugas dan wewenang, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran terbuka, dan jaminan integritas partai yang independen dari perspektif perkiraan keuangan, informasi dan penjelasan.

Menurut Mahmudi (2011:17), transparansi dalam memberikan informasi tentang kegiatan manajemen sumber daya publik bagi mereka yang tertarik adalah keterbukaan organisasi. Menurut Andrianto (2007:43), transparansi publik inklusif, inklusif dan terbuka untuk menyediakan ruang untuk partisipasi aktif semua tingkat sosial dalam proses manajemen sumber daya publik. Setiap pedoman yang diberikan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mayoritas.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007:76), yaitu:

- a) Mencegah korupsi
- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi adalah prinsip yang memastikan akses atau kebebasan bagi siapa saja untuk menerima informasi tentang manajemen pemerintah dan manajemen kegiatan lain, yaitu pedoman, proses penciptaan dan implementasi, dan informasi tentang hasil yang dicapai. Transparansi adalah upaya untuk menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, memastikan akuisisi dengan mudah dari informasi yang lebih akurat dan relevan.

2.2.1 Indikator Transparansi

Kristianten (2016:52) menyebutkan bahwa indikator transparansi, yaitu:

- a) Hak untuk mengetahui, hak ini menjamin setiap individu memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan mereka, baik dari pemerintah maupun lembaga lain yang berpengaruh pada kehidupan publik.
- b) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan, seperti menghadiri sidang dewan perwakilan atau forum-forum diskusi publik.
- c) Hak untuk mengemukakan pendapat, hak ini melindungi kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau kritik, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya ancaman atau pembatasan yang tidak proporsional.
- d) Hak untuk memperoleh dokumen publik, hak ini mengacu pada akses terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau lembaga publik yang tidak bersifat rahasia atau dilindungi undang-undang.
- e) Hak untuk diberi informasi, hak ini menuntut adanya proaktif dari lembaga pemerintah atau badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan, mudah diakses, dan tepat waktu.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi (informasi) untuk aliran informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, fakta, dan informasi pemangku kepentingan yang secara jelas dan akurat membutuhkan informasi. Menurut Mardiasmo (2011), indikator gambar yang berguna meliputi:
 - a. Tepat waktu. Laporan keuangan tahunan harus disajikan pada waktu yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan ekonomi, sosial dan politik, dan penundaan keputusan dapat dihindari.
 - b. sesuai. Sesuai dengan prinsip -prinsip akuntansi yang diterima secara umum di Indonesia, penyajian laporan keuangan tahunan mencakup beban pengungkapan masalah materi yang tepat dan menguntungkan.
 - c. Jernih. Informasi harus jelas sehingga dapat dipahami dengan cara yang tidak menyebabkan kesalahpahaman.
 - d. Sangat tepat. Untuk pengguna yang menerima dan menggunakan informasi, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Tepatnya, itu berarti bahwa informasi tersebut harus mencerminkan maknanya dengan jelas.
 - e. Gelar yang nyaman harus dibandingkan antara periode dan institusi serupa. Oleh karena itu, keluhan ini berarti bahwa laporan keuangan tahunan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi serupa lainnya.
 - f. Informasi perlu mudah diakses oleh semua pihak.

2) Pengungkapan publik atau umum (pihak yang berkepentingan) (Pengungkapan) Pengungkapan

- a. Keadaan keuangan. Iklan penuh atau keadaan keuangan atau organisasi organisasi untuk periode atau periode tertentu.
- b. Dewan direksi. Komponen (unit pekerjaan) dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana berbagai fungsi dan kegiatan diintegrasikan (terkoordinasi).
- c. Format rencana dan hasil kegiatan. Banyak tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.2.2.Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip -prinsip terbuka tidak hanya terkait dengan penggalangan dana, tetapi juga dengan perencanaan pemerintah, terdiri atas 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a) Keterbukaan informasi tentang dokumen yang perlu diketahui masyarakat
- b) Keterbukaan Keterbukaan (Keputusan - Langkah -Langkah Untuk Membuat Rencana)
- c) Daftar Keterbukaan dengan Fakta Hukum (Registrasi Sipil, Buku Tanah, dll.)
- d) Keterbukaan menerima partisipasi masyarakat

2.3 Penggunaan Dana Desa

2.3.1 Pengertian Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa mengacu bagaimana dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi di desa. Para ahli memberikan beragam definisi dan perspektif terkait penggunaan dana desa, yang sebagian besar berfokus pada aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa penggunaan dana desa harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Penggunaan dana tersebut harus transparan, tepat sasaran, dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dana desa **ialah** dana APBN desa yang dikirim melalui Tata Kelola/Kota APBD dan memprioritaskan implementasi pengembangan dan penguatan masyarakat desa. Dana desa ditujukan untuk desa -desa dan desa tradisional, dikirim oleh tata kelola/kota APBD dan dialokasikan sama -sama untuk setiap desa.

Adapun tujuan dari dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut: (Rangga, 2019:10)

- a) Meningkatkan pelayanan publik.
- b) Mengentaskan kemiskinan.
- c) Memajukan perekonomian masyarakat.
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Desa
- b) Dana Desa yang bersumber dari APBN
- c) Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
- d) Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
- e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
- f) Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3.2 Konsep Desa

Pasal 6 Undang -Undang 1 Pasal 2014 menjelaskan desa -desa yang disebut sebagai unit hukum komunitas hukum yang menghormati perbatasan teritorial resmi atau sistem pemerintah pemirsa terpadu Indonesia., menurut Widjaja (2003: 5), "adalah kesatuan komunitas hukum dengan perjanjian asli berdasarkan asal -

usul sayap yang benar. Fondasi pemikiran internal dalam peraturan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi, dan demokratisasi dan penguatan Komunitas "

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam undang undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada undang-undang RI No.6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Otoritas desa memiliki wewenang di bidang tata kelola desa, implementasi pengembangan desa, pengembangan komunitas desa, inisiatif masyarakat, hak desa, persetujuan bea cukai desa.

2.3.3 Indikator Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa tersebut seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yaitu:

- a) Pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dari kehidupan untuk besar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Muhi (2011: 4), pembangunan perdesaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya. Eko (2016) mengatakan bahwa pembangunan desa berkelanjutan yang terpadu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maupun penanggulangan kemiskinan, melainkan menampilkan enam agenda utama, yaitu: (1). Membangun infstruktur fisik desa, yang mencakup jalan, irigasi, listrik, jaringan komunikasi, air dan sanitasi, perumahan desa; (2). Membangun keberlanjutan sosial (*social sustainability*), yakni membangun keamanan dan ketahanan sosial warga dan komunitas desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum yang membuat kerentanan bagi mereka; (3). Membangun ekonomi dan penghidupan desa, yang mencakup penyediaan lapangan pekerjaan dan menggali pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset desa maupun bantuan pendanaan dari pihak luar desa (pemerintah, bank, NGO, pengusaha, dan lain-lain); (4). Membangun demokratisasi desa. Ini merupakan aspek politik dalam pembangunan desa, yang mencakup upaya-upaya memperkuat akuntabilitas pemimpin desa, transparansi pengelolaan kebijakan dan anggaran desa, responsivitas pemimpin dan kebijakan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan; (5). Membangun kapasitas institusional desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Kapasitas lokal merupakan tujuan dan sekaligus prakondisi desentralisasi dari pusat ke lokal; dan (6). Membangun modal sosial

masyarakat desa. Modal sosial sering dipahami sebagai struktur (organisasi lokal atau wadah) untuk mengembangkan norma-norma sosial (kerjasama, kepercayaan, solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat. Pembangunan desa tentu harus diorientasikan juga untuk mengembangkan modal sosial ini, sebagai basis partisipasi dan kemandirian masyarakat desa.

b) Pemberdayaan masyarakat

Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri

Menurut Muhi (2011:4), pengembangan pedesaan dalam aspek peningkatan masyarakat, yaitu, pengembangan yang mewakili aspek-aspek kunci dari keterampilan, kemampuan, dan pengakuan orang pedesaan, seperti pendidikan, adalah bentuk pelatihan, pengembangan, dan banyak lagi melarikan diri dari retret politik seperti kesehatan dan ekonomi, social.

Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan masyarakat dapat dibandingkan dengan tujuan yang memperkuat masyarakat adalah subjek utama

dan yang memberi masyarakat keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat paling tidak memiliki empat hal yaitu:

- a. Kegiatan yang terancana dan kolektif, yakni semua kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat kondisi masyarakat desa setempat dan dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama di seluruh desa.
- b. Memperbaiki kehidupan masyarakat, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik taraf hidup sosialnya maupun ekonominya.
- c. Prioritaskan bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dari aspek sosial dan ekonominya.
- d. Dilakukan melalui program peningkatan kapabilitas, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dalam segala aspek kegiatan.

2.4 Hubungan Antara Akuntabilitas Terhadap Penggunaan Dana Desa

Menurut Sedarmayanti (2017), akuntabilitas publik khususnya dalam pemerintahan desa, mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Ia menekankan bahwa akuntabilitas dalam penggunaan dana desa

sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2.4.1 Hubungan Antara Transparansi Terhadap Penggunaan Dana Desa

Sedarmayanti (2017) mengemukakan bahwa transparansi adalah salah satu unsur utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menekankan bahwa transparansi memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mengawasi dan memberikan masukan. dengan transparansi, setiap pengeluaran dana desa lebih mudah dipertanggungjawabkan, mengurangi potensi korupsi, dan memastikan anggaran benar-benar dialokasikan sesuai prioritas desa.

2.4.2 Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Dana Desa

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik yang baik. Dalam konteks dana desa, transparansi memastikan bahwa proses perencanaan dan realisasi anggaran desa terbuka untuk diketahui masyarakat, sementara akuntabilitas mewajibkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. kombinasi transparansi dan akuntabilitas ini membantu menciptakan sistem pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat bisa memantau dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai kebutuhan dan mencapai tujuan pembangunan desa.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah dilakukan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan, yakni.

Kumalasari, Deti, dkk. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan prinsip transparansi dan untuk menentukan akuntabilitas peraturan desa dalam alokasi bulanan desa (penambahan) termasuk perencanaan, implementasi, pelaporan dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Para penutur terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, wakil ketua titik konsultasi desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Teknik perekaman data dengan wawancara dan dokumenter. Teknik analisis data dimulai dengan struktur data, penyederhanaan analisis data, dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banyuwangi Regency, kerusuhan Bobo di distrik Rogojampi, telah menerapkan prinsip -prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ADD Management. Perencanaan dan implementasi alokasi dana desa mengimplementasikan prinsip -prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas fisik dari ADD menunjukkan implementasi yang transparan dan bertanggung jawab, tetapi itu lebih lanjut dalam hal manajemen

Rosyan, Adam Nurfaizi, dkk. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Kemudian, secara bersama-sama akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa.

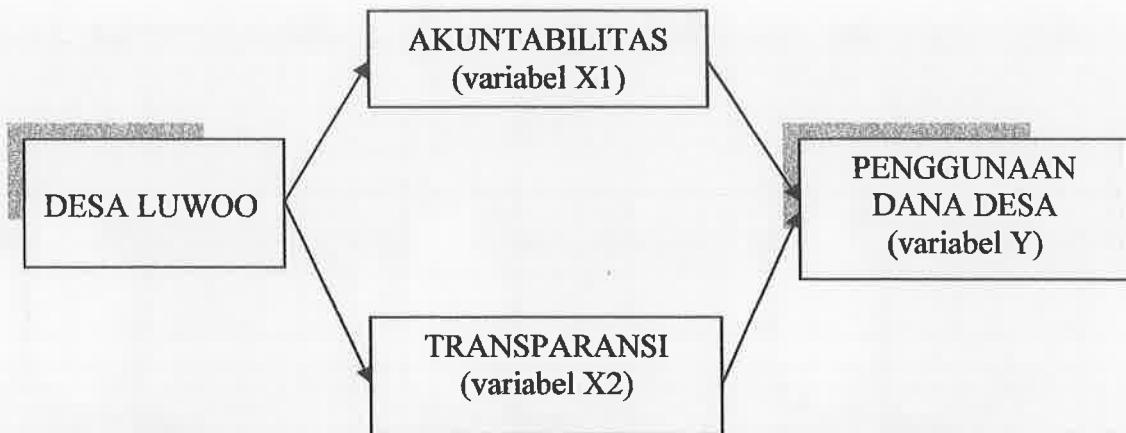
Ismail, Nuraini, dkk. 2023. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur). Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)" sebagian besar belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Tahap perencanaan dan pelaksanaan untuk transparansi, penatausahaan untuk akuntabilitas, dan pelaporan untuk akuntabilitas, belum sesuai peraturan. Adapun tahap pertanggungjawaban untuk akuntabilitas sudah sesuai peraturan.

Rahmawati, Sumiati, dkk. 2024. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, tidak ditemukan penyimpangan. hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. sementara itu, secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

2.6 Kerangka Pikir

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam rangka mengurangi kemiskinan, memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi antara satu desa dengan desa lainnya. Dapat dikatakan bahwa bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, agar dalam penggunaan dana desa, hendaknya digunakan prinsip good governance, yakni akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pemerintah atas dan masyarakat. Adapun transparansi menyangkut pemberian informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa, sehingga masyarakat menjadi paham tentang penggunaan dana desa. Kerangka pikir dalam penelitian ini, yakni:



Gambar 2.1. Bagan kerangkan pikir

2.7 Hipotesis

Menurut Arikunto (2006: 71), hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian sampai ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan. Hipotesis penelitian ini, yakni:

H1: Akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) berpengaruh terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

H0: Akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) tidak berpengaruh terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya kabupaten Gorontalo. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni tiga bulan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penenlitian

Saat melakukan penelitian ini, penulis memilih metode survei, yaitu studi kuantitatif menggunakan studi menggunakan kata -kata, kalimat dan gambar, menggunakan angka, sampel, dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Singarimbun dan Effendi (2016:3) menyatakan bahwa penelitian survei yakni penelitian yang menggunakan sampel dengan memakai kuesioner menjadi instrument pengumpulna data.

3.2.2 Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), yang di operasionalisasikan dalam bentuk matriks seperti dibawah ini:

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel X1, X2 dan Y

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
AKUNTABILITAS (variabel X1) Menurut Yango dalam Safroni (2017:142)	<p>a. Akuntabilitas tradisional/regular</p> <p>b. Akuntabilitas manajerial</p> <p>c. Akuntabilitas program</p> <p>d. Akuntabilitas proses</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kepatuhan terhadap peraturan-peraturan terkait bidang keuangan - efisiensi dalam menggunakan anggaran - efisiensi dalam menggunakan sumber daya manusia - pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup tugasnya - tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dari setiap pelaksanaan kegiatan - tingkat pencapaian ekonomi 	Liker

		masyarakat dari setiap pelaksanaan kegiatan	
TRANSPARANSI (variabel X2) Menurut Kristianten (2016:52)	<p>a. Hak untuk mengetahui</p> <p>b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik</p> <p>c. Hak untuk mengemukakan pendapat</p> <p>d. Hak untuk memperoleh dokumen publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap warga masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan mereka - masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan di musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa - setiap warga masyarakat menyampaikan pandangan, pendapat, atau kritik, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya ancaman atau pembatasan yang tidak proporsional. - warga masyarakat diberi akses terhadap dokumen-dokumen kegiatan yang dibiayai dana desa 	Liker

	e. Hak untuk diberi informasi	<ul style="list-style-type: none"> - tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan - tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat yang mudah diakses dan tepat waktu 	
PENGGUNAAN DANA DESA (variabel Y) Menurut Eko (2016); Mardikanto dan Soebiato (2017)	a. Pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - membangun infstruktur fisik desa - membangun keamanan dan ketahanan sosial warga dan komunitas desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum - penyediaan lapangan pekerjaan dan menggali pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset desa maupun bantuan pendanaan dari pihak luar desa - memperkuat akuntabilitas 	Liker

		<p>pemimpin desa, transparansi pengelolaan anggaran desa, responsivitas pemimpin, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - membangun kapasitas institusional desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan - mengembangkan kerjasama, kepercayaan, solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat <p>b. Pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat kondisi masyarakat desa setempat dan dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama di seluruh desa 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik taraf hidup sosialnya maupun ekonominya - pemberdayaan masyarakat lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dari aspek sosial dan ekonominya - kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dalam segala aspek kegiatan 	
--	--	--	--

Dalam melakukan uji operasional dari masing-masing variabel akan diukur

dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner disusun dengan menyiapkan lima pilihan jawaban, yang masing-masing pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda, yaitu seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Bobot nilai variabel

Pilihan jawaban	Bobot nilai
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam penelitian ini Anggota BPD, perangkat desa, dan warga masyarakat.

3.3.2 Sampel

Arikunto dalam Riduwan (2018:56) mengatakan bahwa sampel ialah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yakni sampel pertimbangan atau subjektif, dimana peneliti mempertimbangkan bahwa hanya orang-orang tertentu yang memahami dan mengetahui serta informasi yang memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti, yakni sebanyak 43 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut:

- 1) Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.
- 2) Angket atau kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data. Pertanyaan yang diajukan yakni berkaitan dengan topik penelitian, yakni akuntabilitas, transparansi dan penggunaan dana desa.

3.6 Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan, sudah pasti diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik. Untuk

meyakini bahwa instrumen atau alat ukur tersebut harus di uji validitas dan realibilitasnya terlebih dahulu.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:219) validitas ialah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. menurut masrun dalam buku Sugiyono (2007:124) menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kritirium (skor total) serta kolerasi yang tinggi, menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Untuk pengujian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Angka korelasi

X = varibel bebas (independent)

Y = varibael terikat(dependent)

n = Jumlah responden

Selanjutnya di hitung dengan uji t dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = nilai hitung

n = jumlah responden

r = koefisien korelasi hasil t hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t-student dan dibandingkan dengan tabel t pada derajat bebas ($n-2$), taraf signifikan yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila t dibawah atau sama dengan nilai t tabel, maka pertanyaan dikatakan tidak valid. sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi koefisien

r	Keterangan
0,000 - 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 - 0,399	Korelasi rendah
0,400 - 0,699	Korelasi sedang
0,700 - 0,899	Korelasi Tinggi
0,900 - 1,000	Korelasi sangat tinggi

3.6.2 Uji reliabilitas

Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsisten alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaan ataupun pertanyaan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas, digunakan teknik *alfa cronbach (a)*, yang dilakukan untuk jenis data interval yang telah memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel $\geq 0,60$ atau 60%.

Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach (a), yakni:

$$a = \left(\frac{k}{k - 1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2}{a1^2} \right)$$

Keterangan:

a = Relibilitas intrument

k = Banyaknya pertanyaan

$\sum a^2$ = Jumlah pertanyaan

$a1^2$ = Total varians

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa dan menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan dana desa, maka penulis melakukan perhitungan dengan

menggunakan rumus regresi berganda. Dan selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan menggunakan uji t.dimana variabel X1 adalah akuntabilitas, varibel X2 adalah trasnparansi serta variabel Y adalah penggunaan dana desa dengan menggunakan regresi berganda sebagai berikut.

1.Regresi berganda

Dimana:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon$$

Y = Penggunaan Dana Desa

X = Konstanta

B1,B2 = Koefisien Regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

ε = Faktor Pengganggu

2.rumus korelasi person product moment

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Angka korelasi

X = variabel bebas (independent)

Y = variabel terikat(dependent)

n = banyaknya sampel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Luwoo

Pada masa pemerintah Raja Ilahude terjadi perkembangan pemukiman oleh suku hulontalangi yang sebagian besar mendiami pesisir laut dan pesisir danau limboto. Areal Danau Limboto dahulu kala pelabuhan nya sampai di Desa Luwoo yang berbentuk teluk yakni air yang menjorok ke daratan..

Suku hulontalangi, ini banyak mendiami pantai atau lembah teluk ini, karena mereka sudah berkembang jumlah penduduknya maka dibentuk suatu desa yang disebut luwoo artinya tempat luwo-luwoo atau teluk. Mereka menanam pohon bambu, disepanjang teluk untuk bahan baku sero atau olate. Atau penangkap ikan yang merupakan mata pencarian rakyat desa tersebut.

Nama Desa Luwoo ditinjau dari historis. Perilaku masyarakat desa luwoo setiap pemimpin yang memerintah Desa Luwoo beroleh sukses apabila bertindak demokratis, peduli, dan penuh kearifan serta menjunjung tinggi musyawarah mufakat, dan tidak memaksakan kehendak atau mengayomi yang disebut dengan bahasa Gorontalo de luluwo'u artinya nanti kuayomi dengan penuh musyawarah.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Luwoo

“LUWOO GEMILANG DAN MANDIRI”

MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERADAB

A. Gemilang

Gemilang secara operasional dapat diartikan sebagai kinerja dalam pembangunan yang lebih baik sesuai standar normatif yang disepakati

B. Mandiri

Mandiri selaras dengan posisi kategori Desa Luwoo sebagai desa maju, maka mandiri mewujudkan:

- a) kebebasan dalam mengambil inisiatif, mengatasi masalah dan hambatan, gigih dalam berjuang dan berusaha dan bertanggung jawab
- b) berprestasi demi tercapainya tujuan
- c) Siap bersaing untuk maju demi kebaikan

c. Beradab

Beradab adalah mempunyai budi pekerti dan pola tingkah laku yg baik dan sopan melalui peranan desa yang damai dan berkeadilan serta berbudaya, dinamis dan adaptif.

MISI

- 1) Pengelolaan pemerintahan yang baik, bersi, dinamis, terpercaya dilandasi budaya adaptif.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui konektivitas kelembagaan

- 3) Menumuhukan ekonomi inovatif yang berkualitas tanpa kesenjangan menuju produksi desa yang sadar lingkungan.
- 4) Pembangunan berdasarkan kependudukan dan pemberdayaan kemasyarakatan menuju desa sehat, bersih dan sejahtera.

4.1.3 Tugas pokok

1) Kepala Desa

Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2) Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya.
- b. Membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat desa

3) Kasie Pemerintahan

- a. Bertugas melaksanakan manajemen tata praia pemerintahan desa
- b. Menyusun rancangan regulasi desa.

4) Kasie Kesejahteraan

- a. Bertugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana
- b. Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan

5) Kasie Perencanaan

- a. Bertugas menyusun perencanaan program
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan adminitsrasi perencanaan

6) Kaur Keuangan

- a. Bertugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
- b. Membahas dan menyepakati APBDdesa dengan BPD

7) Kaur Umum

- a. Bertugas melaksanakan kegiatan anggaran (PKA)
- b. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL
- c. Menandatangani perjanjian kerja sama.

8) Kepala Dusun

- a. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Melindungi masyarakat.
- c. Mengatur mobilitas penduduk.

4.2 Hasil Penelitian

Kuesioner merupakan alat pengumpul data utama dalam penelitian ini. Olehnya itu, sebelum digunakan kepada responden, terlebih dahulu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas penting untuk menjemini bahwa kuesioner yang digunakan memiliki keandalan.

4.2.1 Hasil uji validitas kuesioner

Uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Hasil uji validitas akuntabilitas (X1), transparansi pemerintah (X2), dan penggunaan dana desa (Y)

variabel	pertanyaan	$r_{tabel} = 0,308$	r_{hitung}	kesimpulan
akuntabilitas (X1)	1	0,308	0,709	valid
	2		0,757	valid
	3		0,731	valid
	4		0,791	valid
	5		0,884	valid
	6		0,806	valid
transparansi pemerintah (X2)	1	0,308	0,818	valid
	2		0,824	valid
	3		0,857	valid
	4		0,828	valid
	5		0,800	valid
	6		0,784	valid
penggunaan dana desa (Y)	1	0,308	0,782	valid
	2		0,762	valid
	3		0,788	valid
	4		0,709	valid
	5		0,788	valid
	6		0,767	valid
	7		0,723	valid
	8		0,763	valid
	9		0,757	valid
	10		0,754	valid

Sumber: kuesioner tahun 2025

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) yang terdiri atas enam pertanyaan dan penggunaan dana desa

(Y) yang terdiri atas sepuluh pertanyaan, semuanya menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,281), sehingga disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.2.2 Hasil uji reliabilitas kuesioner

Dalam penelitian ini, uji reabilitas kuesioner menggunakan metode *cronbach's alpha*, dengan ketentuan nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,60$ atau 60%. Hasil uji reliabilitas kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Hasil uji reliabilitas akuntabilitas (X1), transparansi pemerintah (X2), dan penggunaan dana desa (Y)

Variabel	Jumlah pertanyaan	nilai <i>cronbach's alpha</i>	nilai keofisiennya reliabilitas
akuntabilitas (X1)	6	0,923	0,60
transparansi pemerintah (X2)	6	0,938	0,60
penggunaan dana desa (Y)	10	0,941	0,60

Sumber: kuesioner tahun 2025

Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) yang terdiri atas enam pertanyaan dan penggunaan dana desa (Y) yang terdiri atas sepuluh pertanyaan melalui metode *cronbach's alpha*, semuanya memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai 0,60. Ini berarti bahwa semua pertanyaan disimpulkan reliable atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis deskriptif dalam penelitian ini, dibuatkan nilai bobot dari butir-butir kuesioner berdasarkan pada masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya, dilakukan pendeskripsikan terhadap bobot tersebut, dengan dilakukannya suatu perhitungan pada frekwensi dan berdasarkan bobot pilihan jawaban.

4.3.1 Deskripsi variabel akuntabilitas (X1)

Hasil jawaban responden yang terlihat dalam tabulasi data adalah variabel akuntabilitas (X1). Variabel ini merupakan jawaban atas pertanyaan pada kuesioner yang dinyatakan oleh 43 responden, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang akuntabilitas (X1)

Pilihan Jawaban	Pertanyaan 1		Pertanyaan 2		Pertanyaan 3	
	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase
SELALU	13	30.2	12	27.9	14	32.6
SERING	17	39.5	17	39.5	19	44.2
KADANG-KADANG	11	25.6	12	27.9	9	20.9
JARANG	2	4.7	2	4.7	1	2.3
TIDAK PERNAH	0	0	0	0	0	0
Total	43	100%	43	100%	43	100%
Pilihan Jawaban	Pertanyaan 4		Pertanyaan 5		Pertanyaan 6	
	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase
SELALU	11	25.6	16	37.2	10	23.3
SERING	20	46.5	18	41.9	17	39.5
KADANG-KADANG	10	23.3	8	18.6	15	34.9

JARANG	2	4.7	1	2.3	1	2.3
TIDAK PERNAH	0	0	0	0	0	0
Total	43	100%	43	100%	43	100%

Sumber data: kuesioner tahun 2025

Berdasarkan tanggapan responden terhadap enam pertanyaan untuk mengukur akuntabilitas (X1), dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 1 mengenai pemerintah desa patuh terhadap peraturan-peraturan terkait bidang keuangan dalam penggunaan dana desa, sebanyak 13 responden (30,2%) mengatakan selalu, 17 responden (39,5%) mengatakan sering, 11 responden (25,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 2 responden (4,7%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah patuh terhadap peraturan-peraturan terkait bidang keuangan dalam penggunaan dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 2 mengenai pemerintah desa mengutamakan efisiensi dalam menggunakan anggaran dana desa, sebanyak 12 responden (27,9%) mengatakan selalu, 17 responden (39,5%) mengatakan sering, 12 responden (27,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 2 responden (4,7%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah mengutamakan efisiensi dalam menggunakan anggaran dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 3 mengenai pemerintah desa mengutamakan efisiensi dalam menggunakan sumber daya manusia, sebanyak 14 responden (32,6%) mengatakan selalu, 19 responden (44,2%) mengatakan sering, 9 responden (20,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%)

mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah mengutamakan efisiensi dalam menggunakan sumber daya manusia.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 4 mengenai pemerintah desa mengusahakan pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup tugasnya dalam penggunaan dana desa, sebanyak 11 responden (25,6%) mengatakan selalu, 20 responden (46,5%) mengatakan sering, 10 responden (23,3%) mengatakan kadang-kadang, dan 2 responden (4,7%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah mengusahakan pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup tugasnya dalam penggunaan dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 5 mengenai pemerintah desa mengusahakan tercapainya tingkat kesejahteraan sosial dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, sebanyak 16 responden (37,2%) mengatakan selalu, 18 responden (41,9%) mengatakan sering, 8 responden (18,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah mengusahakan tercapainya tingkat kesejahteraan sosial dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 6 mengenai pemerintah desa mengusahakan tercapainya tingkat ekonomi masyarakat dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, sebanyak 10 responden (23,3%)

mengatakan selalu, 17 responden (39,5%) mengatakan sering, 15 responden (34,5%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah mengusahakan tercapainya tingkat ekonomi masyarakat dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.

4.3.2 Deskripsi variabel transparansi pemerintah (X2)

Hasil jawaban responden yang terlihat dalam tabulasi data adalah variabel transparansi pemerintah (X2). Variabel ini merupakan jawaban atas pertanyaan pada kuesioner yang dinyatakan oleh 43 responden, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang transparansi pemerintah (X2)

Pilihan Jawaban	Pertanyaan 1		Pertanyaan 2		Pertanyaan 3	
	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase
SELALU	14	32.6	8	18.6	15	34.9
SERING	19	44.2	27	62.8	18	41.9
KADANG-KADANG	9	20.9	7	16.3	9	20.9
JARANG	1	2.3	1	2.3	1	2.3
TIDAK PERNAH	0	0	0	0	0	0
Total	43	100%	43	100%	43	100%
Pilihan Jawaban	Pertanyaan 4		Pertanyaan 5		Pertanyaan 6	
	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase	Frekuensi	persentase
SELALU	10	23.3	13	30.2	12	27.9
SERING	17	39.5	21	48.8	17	39.5
KADANG-KADANG	14	32.6	7	16.3	13	30.2
JARANG	1	2.3	1	2.3	1	2.3
TIDAK	1	2.3	1	2.3	0	0

PERNAH						
Total	43	100%	43	100%	43	100%

Sumber data: kuesioner tahun 2025

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 1 mengenai setiap warga masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan mereka terkait penggunaan dana desa, sebanyak 14 responden (32,6%) mengatakan selalu, 19 responden (44,2%) mengatakan sering, 9 responden (20,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap warga masyarakat sudah memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan mereka terkait penggunaan dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 2 mengenai masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan di musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa terkait program yang dibiayai dana desa, sebanyak 8 responden (18,6%) mengatakan selalu, 27 responden (62,8%) mengatakan sering, 7 responden (16,3%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan di musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa terkait program yang dibiayai dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 3 mengenai setiap warga masyarakat menyampaikan pandangan, pendapat, atau kritik, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya ancaman atau pembatasan yang tidak proporsional,

sebanyak 15 responden (34,9%) mengatakan selalu, 18 responden (41,0%) mengatakan sering, 9 responden (20,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap warga masyarakat sudah menyampaikan pandangan, pendapat, atau kritik, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya ancaman atau pembatasan yang tidak proporsional.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 4 mengenai warga masyarakat diberi akses terhadap dokumen-dokumen kegiatan yang dibiayai dana desa, sebanyak 10 responden (23,3%) mengatakan selalu, 17 responden (39,5%) mengatakan sering, 14 responden (32,6%) mengatakan kadang-kadang, 1 responden (2,3%) mengatakan jarang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan tidak pernah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa warga masyarakat sudah diberi akses terhadap dokumen-dokumen kegiatan yang dibiayai dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 5 mengenai tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan tentang penggunaan dana desa, sebanyak 13 responden (30,0%) mengatakan selalu, 21 responden (48,8%) mengatakan sering, 7 responden (16,3%) mengatakan kadang-kadang, 1 responden (2,3%) mengatakan jarang, dan 1 responden mengatakan tidak pernah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan tentang penggunaan dana desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 6 mengenai tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat yang mudah diakses dan tepat waktu

tentang penggunaan dana desa, sebanyak 12 responden (27,9%) mengatakan selalu, 17 responden (39,5%) mengatakan sering, 13 responden (30,2%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat yang mudah diakses dan tepat waktu tentang penggunaan dana desa.

4.3.3 Deskripsi variabel penggunaan dana desa (Y)

Hasil jawaban responden yang terlihat dalam tabulasi data adalah variabel penggunaan dana desa (Y). Variabel ini merupakan jawaban atas pertanyaan pada kuesioner yang dinyatakan oleh 43 responden, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang penggunaan dana desa (Y)

Pilihan Jawaban	Pertanyaan 1		Pertanyaan 2		Pertanyaan 3		Pertanyaan 4		Pertanyaan 5	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
SELALU	13	30.2	10	23.3	10	23.3	10	23.3	9	20.9
SERING	21	48.8	23	53.5	23	53.5	24	55.8	24	55.8
KADANG-KADANG	8	18.6	9	20.9	9	20.9	8	18.6	9	20.9
JARANG	1	2.3	1	2.3	1	2.3	1	2.3	1	2.3
TIDAK PERNAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	43	100%	43	100%	43	100%	30	100%	30	100%
Pilihan Jawaban	Pertanyaan 6		Pertanyaan 7		Pertanyaan 8		Pertanyaan 9		Pertanyaan 10	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
SELALU	10	23.3	14	32.6	12	27.9	13	30.2	12	27.9

SERING	18	41.9	22	51.2	18	41.9	19	44.2	25	58.1
KADANG-KADANG	15	34.9	7	16.3	13	30.2	11	25.6	6	14.0
JARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIDAK PERNAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	43	100%	43	100%	43	100%	30	100%	30	100%

Sumber data: kuesioner tahun 2025

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 1 mengenai membangun infstruktur fisik desa, sebanyak 13 responden (30,2%) mengatakan selalu, 21 responden (48,8%) mengatakan sering, 8 responden (18,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana sudah digunakan untuk membangun infstruktur fisik desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 2 mengenai membangun keamanan dan ketahanan sosial warga dan komunitas desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, sebanyak 10 responden (23,3%) mengatakan selalu, 23 responden (53,5%) mengatakan sering, 9 responden (20,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana desa sudah dapat membangun keamanan dan ketahanan sosial warga dan komunitas desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 3 mengenai penyediaan lapangan pekerjaan dan menggali pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset desa maupun bantuan pendanaan dari pihak luar desa, sebanyak 10 responden (23,3%) mengatakan selalu, 23 responden (53,5%) mengatakan sering,

9 responden (20,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana desa sudah digunakan untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan menggali pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset desa maupun bantuan pendanaan dari pihak luar desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 4 mengenai memperkuat akuntabilitas pemimpin desa, transparansi pengelolaan anggaran desa, responsivitas pemimpin, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, sebanyak 10 responden (23,3%) mengatakan selalu, 24 responden (55,8%) mengatakan sering, 8 responden (18,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana desa sudah digunakan untuk memperkuat akuntabilitas pemimpin desa, transparansi pengelolaan anggaran desa, responsivitas pemimpin, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 5 mengenai membangun kapasitas institusional desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sebanyak 9 responden (20,9%) mengatakan selalu, 24 responden (55,8%) mengatakan sering, 9 responden (20,9%) mengatakan kadang-kadang, dan 1 responden (2,3%) mengatakan jarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana desa sudah digunakan membangun kapasitas institusional desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 6 mengenai mengembangkan kerjasama, kepercayaan, solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat, sebanyak 10 responden (23,3%) mengatakan selalu, 18 responden (41,9%) mengatakan sering, dan 15 responden (34,9%) mengatakan kadang-kadang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana desa sudah digunakan membangun mengembangkan kerjasama, kepercayaan, solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 7 mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat kondisi masyarakat desa setempat dan dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama di seluruh desa, sebanyak 14 responden (32,6%) mengatakan selalu, 22 responden (51,2%) mengatakan sering, dan 7 responden (16,3%) mengatakan kadang-kadang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat kondisi masyarakat desa setempat dan dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama di seluruh desa.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 8 mengenai dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik taraf hidup sosialnya maupun ekonominya, sebanyak 12 responden (27,9%) mengatakan selalu, 18 responden (41,9%) mengatakan sering, dan 13 responden (30,2%) mengatakan kadang-kadang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik taraf hidup sosialnya maupun ekonominya.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 9 mengenai pemberdayaan masyarakat lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dari aspek sosial dan ekonominya, sebanyak 13 responden (30,2%) mengatakan selalu, 19 responden (44,2%) mengatakan sering, dan 11 responden (25,6%) mengatakan kadang-kadang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dari aspek sosial dan ekonominya.

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 10 mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dalam segala aspek kegiatan, sebanyak 12 responden (27,9%) mengatakan selalu, 125 responden (58,1%) mengatakan sering, dan 6 responden (14,0%) mengatakan kadang-kadang,. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dalam segala aspek kegiatan.

4.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan menggunakan program SPSS versi 20. Uji hipotesis melihat pada angka F dan juga angka signifikansinya dari tabel Anova, yang terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Tabel anova akuntabilitas (X1), transparansi pemerintah (X2) dan penggunaan dana desa (Y)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	990.262	2	495.131	41.239	.000 ^a
Residual	480.250	40	12.006		
Total	1470.512	42			

Sumber data: kuesioner tahun 2025

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

b. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

Hipotesisnya yang diajukan:

H1: Akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) berpengaruh terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

H0: Akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) tidak berpengaruh terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan angka F penelitian dengan F tabel. Uji dengan membandingkan angka F penelitian dengan F tabel.

Dimana diketahui bahwa:

a) F penelitian sebesar 41,239

b) Menghitung F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan numerator (pembilang) yakni: jumlah variabel – 1 atau $3 - 1 = 2$; dan denominator (penyebut/pembagi) yakni: jumlah sampel (jumlah kasus) –

jumlah variabel atau $43 - 3 = 40$. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 3,23 (tabel F, 2 ; 40).

c) Ketentuan uji hipotesis yakni:

- Jika $F_{\text{penelitian}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika $F_{\text{penelitian}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapat nilai $F_{\text{penelitian}}$ sebesar 41,239. Nilai ini, $F_{\text{hitung}} = 41,239 > F_{\text{tabel}} = 3,23$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa Akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) berpengaruh terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya, untuk mencari pengaruh secara simultan variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, dapat dilihat pada perhitungan dalam model summary, khususnya angka R square, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Model summary pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.821 ^a	.673	.657	3.46500	1.711

Sumber data: kuesioner tahun 2025

- a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)
- b. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

Tabel 4.7 dapat dilihat pada angka R Square (r^2) yakni 0,673. Nilai mengandung makna bahwa pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi

pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,673 atau 67,3%, kemudian sebesar 0,327 atau 32,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

Selanjutnya, untuk mengetahui keeratan hubungan (coefficients correlations) variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Coefficients correlations variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12.917	3.079		4.195	.000
Akuntabilitas (X1)	.234	.378	.168	.619	.539
Transparansi (X2)	.908	.372	.661	2.438	.019

Sumber data: kuesioner tahun 2025

a. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dibuat persamaan struktural regresi berganda dari perhitungan penelitian, yakni:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + \epsilon$$

$$Y = 12,917 + (0,168).X_1 + (0,661).X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

X1 = akuntabilitas

X2 = transparansi pemerintah

Y = penggunaan dana desa

a = konstanta

Makna persamaan struktural regresi berganda tersebut bahwa semua koefisien regresi mempunyai tanda positip, yang berarti apabila nilai-nilai variabel bebas, yakni akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) ditingkatkan, maka akan mendorong peningkatan penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau konstan.

4.4.1. Pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Langkah pertama ialah melakukan uji hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Tidak ada pengaruh antara akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.
- H_1 : Ada pengaruh antara akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Kemudian langkah selanjutnya yakni menghitung besarnya angka t penelitian, dimana diperoleh nilai t penelitian yakni sebesar 0,619 (tabel 4.8). Kemudian, besarnya t tabel yakni sebesar 2,021 (tabel distribusi t). Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika t penelitian (t hitung) $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika t penelitian (t hitung) $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar $0,619 < t$ tabel sebesar 2,021, sehingga disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang

berarti bahwa tidak ada pengaruh antara akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Besarnya pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) yakni sebesar 0,619 dianggap tidak signifikan.

4.4.2 Pengaruh transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Langkah pertama ialah melakukan uji hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Tidak ada pengaruh antara transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.
- H_1 : Ada pengaruh antara transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Kemudian langkah selanjutnya yakni menghitung besarnya angka t penelitian, dimana diperoleh nilai t penelitian yakni sebesar 2,438 (tabel 4.8). Kemudian, besarnya t tabel yakni sebesar 2,021 (tabel distribusi t). Selanjutnya dilakukan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar $2,438 < t$ tabel sebesar 2,021, sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Besarnya pengaruh transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) yakni sebesar 2,438 dianggap signifikan.

Berdasarkan nilai koefisien beta (*standardized coefficients*) (tabel 4.8), dapat diketahui yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya. Apabila dilihat dari nilai koefisien beta dari masing-masing variabel bebas, yakni akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,619, sedangkan nilai koefisien beta transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, yakni sebesar 2,438. Hal ini berarti bahwa transparansi pemerintah (X2) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya.

4.5 Pembahasan

Dana desa sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, pemerataan dalam pembangunan, dan adanya pelayanan yang baik. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh desa merupakan dana yang diberikan secara berkala, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan kegiatan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat desa yang bersangkutan. Untuk itu, setiap pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dengan benar penggunaan dana desa tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desanya.

Akmad et al. (2019) menjelaskan bahwa pengembangan pedesaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah yang dibahas dan partisipasi aktif masyarakat. Untuk mempromosikan ekonomi pedesaan, sumber daya yang cocok untuk perencanaan dan implementasi harus digunakan. Selain itu, potensi ekonomi yang ada perlu digunakan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Jumlah anggaran dana desa diterima oleh pemerintah desa. Ini adalah harapan besar bagi komunitas desa untuk meningkatkan kehidupan mereka. Selain itu, dengan mendeklasikan otoritas atas peraturan desa untuk keuangan desa, termasuk dana desa, peraturan desa ingin mencapai pemerintahan yang baik. Kemampuan desa untuk mengatur desa untuk memimpin dana desa masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Sartono (2019) menyatakan bahwa manajemen dana desa masih rendah dan dianggap bermasalah. Kehadiran penyimpangan dalam pengelolaan dana desa juga mencerminkan pentingnya pemerintahan yang baik dalam pengelolaan desa. Tata kelola memprioritaskan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pergerakan cepat.

Hasil penelitian tentang pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, juga menyimpulkan adanya permasalahan dalam penggunaan dana desa. Pada aspek akuntabilitas, pemerintah desa belum maksimal melakukan efisiensi dalam menggunakan anggaran dana desa, juga kurang maksimal dalam pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan,

serta kurang maksimal dalam pencapaian ekonomi masyarakat dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Masih terdapatnya permasalahan pada akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Luwoo, disebabkan karena pemerintah desa kurang mengacu pada aturan dan pelaksanaan kegiatan yang ada. Temuan penelitian Mustikawati dan Segegarassa (2023) menyimpulkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas diterapkan pada persiapan laporan akuntabilitas yang sesuai dengan aturan dan implementasi kegiatan yang ada. Laporan pertanggung jawaban ini berisi informasi tentang penentuan program, implementasi, anggaran, dan durasi program.

Dilaksanakannya akuntabilitas penggunaan dana desa, maka semua proses penggunaan dana desa akan diberikan kepada pemerintah daerah, dari kegiatan pertemuan hingga perencanaan pembangunan desa hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Halim (2007) menyatakan warga tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui manajemen keuangan, tetapi juga memiliki hak untuk meminta kewajiban akuntabilitas untuk aplikasi manajemen keuangan daerah dan implementasi manajemen keuangan daerah karena kegiatan pemerintah yang terkait dengan mandat. Pada tahap pelaksanaan seharusnya terpasang baliho atau papan informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan yang biayai oleh dana desa, kalau hal ini tidak dilakukan, maka ini menjadi bukti kurangnya keterbukaan pemerintah Desa Luwoo kepada masyarakat tentang dana kegiatan. Dari sisi akuntabilitas kinerja pemerintah belum terlaksana dengan baik karena masyarakat tidak mendapat keterangan mengenai alokasi penggunaan dana desa.

Selanjutnya, pada aspek transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo, juga kurang maksimal, yakni warga masyarakat belum semua diberi akses terhadap dokumen-dokumen kegiatan yang dibiayai dana desa, dan kurang tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat yang mudah diakses dan tepat waktu tentang penggunaan dana desa. Hasil penelitian Trisna (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian kepemrintahan yang baik sudah dilaksanakan dengan benar, tetapi ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan realisasi penggunaan pelaksanaan program yang berkaitan dengan infrastruktur, masih merupakan salah satu kekurangannya. Prasetyo mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi di kalangan aparatur desa, serta keterbatasan akses terhadap teknologi yang memadai merupakan penyebab dan kendala dalam penerapan prinsip transparansi (Ra'is dan Rini, 2024:96).

Pelaksanaan transparansi sebenarnya merupakan cara untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, kerana transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa, termasuk dana desa. Melalui transparansi, masyarakat desa dapat turut serta dalam mengawal pengelolaan dana desa guna mencegah adanya penyelewengan anggaran atau wewenang (Ferarow dan Suprihanto, 2018). Kemudian, Permatasari, dkk (2018) mengatakan bahwa pengelolaan dana desa merupakan sebuah proses pengelolaan keuangan yang berprinsip pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian diimplementasikan dalam dua jenis kegiatan, yaitu: a) dana desa digunakan untuk pembiayaan

pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat, dan b) pembangunan serta pemberdayaan menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa.

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab suatu organisasi untuk mencapai suatu target atau tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan secara berkala (Nafidah dan Suryaningtyas, 2016). Akuntabilitas bisa terealisasi jika informasi yang diberikan bisa dipahami oleh masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandate kepada aparatur negara dalam tata kelola keuangan masyarakat. Dengan demikian masyarakat memiliki hak untuk diberikan informasi terkait keuangan sebagai bentuk evaluasi (Mardiasmo, 2009). Disisi lain, adanya transparansi dalam keuangan bertujuan untuk menghindari adanya praktik korupsi serta untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi atau lembaga, terutama dalam hal keuangan desa karena keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan agar tidak terjadi penyelewengan (Safriani, 2020:64).

Olehnya itu, diperlukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa, karena salah satu tujuan pemberian dana desa adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Partisipasi dapat meningkatkan kualitas pengembangan

desa. Namun, lemahnya akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap dalam pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

- 1) Pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,673 atau 67,3%, adapun sebesar 0,327 atau 32,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat memberikan kontribusi pada penggunaan dana desa. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa dalam mengurangi terjadinya penyinginan dalam penggunaan dana desa di Desa Luwoo.
- 2) Pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,619, sedangkan pengaruh transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, yakni sebesar 2,438. Hal ini berarti bahwa transparansi pemerintah (X2) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, dibanding pengaruh akuntabilitas.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Pemerintah Desa Luwoo harus lebih meningkatkan lagi pelaksanaan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, karena variabel ini masih mendapat tanggapan yang kurang maksimal dari responden. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan secara periodik tentang pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang pemberbiayaannya berasal dari dana desa, berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten.
- 2) Pemerintah Desa Luwoo harus lebih aktif lagi mencari strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, mulai dari kegiatan musyawarah sampai evaluasi kegiatan pembangunan, dengan aktif melakukan musyawarah pada tingkat RT dan RW, dusun sampai musyawarah desa (musrengbang) untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga harus melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana desa yang sesuai dengan peraturan kepada masyarakat, sehingga usulan dari masyarakat juga dapat sesuai atau sejalan dengan apa yang diprioritaskan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Herlianto, Didit. 2017. Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Gosyen Publishing. Yogyakarta.

Krina, P., Lalolo, Loina. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Kristianten. 2016. Transparansi Anggaran Pemerintah. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.

Mardikanto, Totok, dan Soebiato, Poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.

Muhi, Ali Hanapiyah. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor. Jawa Barat.

Safroni, Ladzi. 2017. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Public dalam Konteks Birokrasi di Indonesia. Aditya media publishing. Malang.

Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. PT Refika Aditama. Bandung.

Sugiyono. 2007. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.

Eko, Suntoro. 2016, Reformasi Desa Melalui Daerah, artikel, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD. Yogyakarta

Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Jurnal dan Artikel

Akhmad, A., dkk. (2019). Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepatin Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4(3):120–29.

Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

Ferarow, N., dan Suprihanto, J. 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: evaluasi praktik transparansi dan akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>.

Ismail, Nuraini, dkk. 2023. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Mirai Management*, Volume 8 Issue 3 (2023).

Kumalasari, Deti, dkk. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016.

Mustikawati, Melyana, dan Segarawasesa, Fajar Satriya. 2023. Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. *ournal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 4, No. 5, Mei 2023, e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543.

Nafidah, L. N., dan Suryaningtyas, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>

Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Permatasari, E, dkk. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (September), 186–194.

Rahmawati, Sumiati, dkk. 2024. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Akuntansi'45 Vol 5 No. 1 Mei 2024*. E-ISSN: 2747-2647; P-ISSN: 2828-7215, Hal 641-657.

Ra'is, Dekki Umamur, dan Rini, Yeni Tata. 2024. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa: Analisatren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration& Development*Published by Penerbit ForindVol. 1 No. 2(2024)|Page 89-102.

Rosyan, Adam Nurfaizi, dkk. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Safriani, Andi. 2020. Telaah Terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurisprudentie* | Volume 7 Nomor 1 Juni 2020.

Sartono. 2019. Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Mash+Bermasalah>.

Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).

Temalagi, Selva dan Anakotta, Fanny Monica. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit: ARU Journal* e-ISSN: 2774-6631, April 2021, Volume 2 Nomor 1.

Trisna. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 2, November 2021.

OLAHAN DATA KUESIONER

Akuntabilitas (variabel X1)

No. urut Responden	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	4	2	3	4	4	3	20
2	5	4	4	4	5	5	27
3	4	5	5	5	5	4	28
4	5	5	5	4	5	5	29
5	4	5	4	4	4	3	24
6	4	4	4	4	4	3	23
7	4	5	4	5	5	5	28
8	2	2	2	2	2	2	12
9	5	5	5	5	5	5	30
10	4	3	5	4	4	4	24
11	3	3	4	3	4	3	20
12	4	4	4	4	4	4	24
13	3	4	4	4	4	4	23
14	4	4	3	3	4	4	22
15	5	5	5	4	5	4	28
16	4	4	4	4	3	3	22
17	5	4	4	3	4	5	25
18	4	5	4	4	5	4	26
19	5	4	4	4	4	4	25
20	3	4	4	4	4	4	23
21	4	3	4	3	4	3	21
22	4	4	5	4	4	4	25
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	3	5	5	5	4	26
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	4	3	4	4	3	23
27	4	4	5	4	5	4	26
28	3	4	5	4	4	4	24
29	5	5	4	5	5	4	28
30	3	3	3	3	3	3	18
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	5	5	5	5	4	28
33	5	4	4	4	4	4	25
34	4	4	5	5	5	5	28
35	3	3	3	3	3	3	18
36	5	4	4	5	5	5	28
37	3	4	4	3	3	3	20
38	3	3	3	2	3	3	17
39	4	3	3	4	3	3	20
40	2	3	3	3	3	3	17

41	3	3	4	3	4	4	21
42	3	3	3	4	4	3	20
43	3	3	4	3	3	3	19

Hasil uji validitas dan reliabilitas Akuntabilitas (variabel X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.923	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
nomor 1	19.8837	12.772	.709	.553
nomor 2	19.9302	12.543	.757	.575
nomor 3	19.7674	13.087	.731	.592
nomor 4	19.9070	12.610	.791	.672
nomor 5	19.6977	12.311	.884	.802
nomor 6	20.0000	12.619	.806	.687

Transparansi (varabel X2)

No. urut Responden	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	3	3	3	3	4	3	19
2	5	4	5	5	5	5	29
3	5	5	5	4	4	4	27
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	3	4	4	3	22
7	4	4	4	5	5	5	27
8	2	2	2	1	1	2	10
9	5	5	5	5	5	5	30
10	4	4	4	4	4	3	23
11	4	3	3	3	3	3	19
12	4	4	4	4	4	5	25
13	4	4	4	4	5	4	25
14	5	4	4	4	4	4	25
15	4	4	5	4	5	5	27
16	4	4	4	3	3	3	21
17	4	4	4	3	4	4	23
18	5	4	5	5	4	4	27
19	4	4	4	3	4	4	23
20	3	4	4	4	3	4	22
21	4	4	4	4	3	3	22
22	5	4	4	3	4	4	24
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	5	5	5	5	5	30
26	4	4	5	4	5	3	25
27	5	4	4	5	4	5	27
28	4	4	4	3	4	4	23
29	4	4	5	4	5	5	27
30	3	4	4	3	4	3	21
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	4	5	4	4	4	25
33	5	4	5	5	4	4	27
34	5	5	5	4	5	5	29
35	3	3	3	3	4	3	19
36	5	5	5	4	5	4	28
37	3	4	3	3	3	3	19
38	3	3	3	2	2	3	16
39	4	3	3	3	4	4	21
40	3	3	3	3	3	3	18
41	4	4	4	3	4	4	23
42	3	4	4	4	3	3	21

43	3	3	3	3	4	4	20
----	---	---	---	---	---	---	----

Hasil uji validitas dan reliabilitas Transparansi (varabel X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.938	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
nomor 1	19.8140	13.155	.818	.685
nomor 2	19.9070	13.944	.824	.738
nomor 3	19.7907	12.884	.857	.775
nomor 4	20.0930	12.372	.828	.687
nomor 5	19.8605	12.694	.800	.664
nomor 6	19.9535	13.141	.784	.645

Penggunaan dana desa (variabel Y)

No. urut Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	37
2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	37
7	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	35
8	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	25
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	35
11	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	34
12	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
13	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	43
14	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
15	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	45
16	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	34
17	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	36
18	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	47
19	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	44
20	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	36
21	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	36
22	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	45
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	43
27	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
30	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	35
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	35
33	3	3	4	5	3	3	3	4	4	4	36
34	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	45
35	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	39
36	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	44
37	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
38	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38
39	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	35
40	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	32
41	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	35
42	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	36

43	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	34
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Hasil uji validitas dan reliabilitas Penggunaan dana desa (variabel Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
nomor 1	36.1163	28.058	.782	.699
nomor 2	36.2093	28.455	.762	.749
nomor 3	36.2093	28.265	.788	.730
nomor 4	36.1860	28.965	.709	.641
nomor 5	36.2326	28.421	.788	.701
nomor 6	36.3023	28.216	.767	.619
nomor 7	36.0233	29.166	.723	.631
nomor 8	36.2093	28.169	.763	.773
nomor 9	36.1395	28.361	.757	.716
nomor 10	36.0465	29.379	.754	.650

HASIL REKAPITULASI

No. urut Responden	Akuntabilitas (variabel X1)	Transparansi (varabel X2)	Penggunaan dana desa (variabel Y)
1	20	19	37
2	27	29	44
3	28	27	43
4	29	30	50
5	24	24	40
6	23	22	37
7	28	27	35
8	12	10	25
9	30	30	50
10	24	23	35
11	20	19	34
12	24	25	41
13	23	25	43
14	22	25	39
15	28	27	45
16	22	21	34
17	25	23	36
18	26	27	47
19	25	23	44
20	23	22	36
21	21	22	36
22	25	24	45
23	30	30	50
24	26	24	42
25	30	30	50
26	23	25	43
27	26	27	48
28	24	23	40
29	28	27	47
30	18	21	35
31	30	30	50
32	28	25	35
33	25	27	36
34	28	29	45
35	18	19	39
36	28	28	44
37	20	19	38
38	17	16	38
39	20	21	35
40	17	18	32
41	21	23	35

42	20	21	36
43	19	20	34

**DISTRIBUSI FREKUENSI
Akuntabilitas (variabel X1)**

nomor 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	4.7	4.7	4.7
3.00	11	25.6	25.6	30.2
4.00	17	39.5	39.5	69.8
5.00	13	30.2	30.2	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	4.7	4.7	4.7
3.00	12	27.9	27.9	32.6
4.00	17	39.5	39.5	72.1
5.00	12	27.9	27.9	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	9	20.9	20.9	23.3
4.00	19	44.2	44.2	67.4
5.00	14	32.6	32.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	4.7	4.7	4.7
3.00	10	23.3	23.3	27.9
4.00	20	46.5	46.5	74.4
5.00	11	25.6	25.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	8	18.6	18.6	20.9
4.00	18	41.9	41.9	62.8
5.00	16	37.2	37.2	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	15	34.9	34.9	37.2
4.00	17	39.5	39.5	76.7
5.00	10	23.3	23.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Transparansi (varabel X2)

nomor 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	9	20.9	20.9	23.3
4.00	19	44.2	44.2	67.4
5.00	14	32.6	32.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	7	16.3	16.3	18.6
4.00	27	62.8	62.8	81.4
5.00	8	18.6	18.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.3	2.3	2.3
	3.00	9	20.9	20.9	23.3
	4.00	18	41.9	41.9	65.1
	5.00	15	34.9	34.9	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

nomor 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.3	2.3	2.3
	2.00	1	2.3	2.3	4.7
	3.00	14	32.6	32.6	37.2
	4.00	17	39.5	39.5	76.7
	5.00	10	23.3	23.3	100.0
Total		43	100.0	100.0	

nomor 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.3	2.3	2.3
	2.00	1	2.3	2.3	4.7
	3.00	7	16.3	16.3	20.9
	4.00	21	48.8	48.8	69.8
	5.00	13	30.2	30.2	100.0
Total		43	100.0	100.0	

nomor 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.3	2.3	2.3
	3.00	13	30.2	30.2	32.6
	4.00	17	39.5	39.5	72.1
	5.00	12	27.9	27.9	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Penggunaan dana desa (variabel Y)

nomor 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	8	18.6	18.6	20.9
4.00	21	48.8	48.8	69.8
5.00	13	30.2	30.2	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	9	20.9	20.9	23.3
4.00	23	53.5	53.5	76.7
5.00	10	23.3	23.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	9	20.9	20.9	23.3
4.00	23	53.5	53.5	76.7
5.00	10	23.3	23.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	8	18.6	18.6	20.9
4.00	24	55.8	55.8	76.7
5.00	10	23.3	23.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	2.3	2.3	2.3
3.00	9	20.9	20.9	23.3
4.00	24	55.8	55.8	79.1
5.00	9	20.9	20.9	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	15	34.9	34.9	34.9
4.00	18	41.9	41.9	76.7
5.00	10	23.3	23.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	16.3	16.3	16.3
4.00	22	51.2	51.2	67.4
5.00	14	32.6	32.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	13	30.2	30.2	30.2
4.00	18	41.9	41.9	72.1
5.00	12	27.9	27.9	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	11	25.6	25.6	25.6
4.00	19	44.2	44.2	69.8
5.00	13	30.2	30.2	100.0
Total	43	100.0	100.0	

nomor 10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	14.0	14.0
	4.00	25	58.1	72.1
	5.00	12	27.9	100.0
	Total	43	100.0	100.0

REGRESI LINIER BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penggunaan dana desa (Y)	40.1860	5.91711	43
Akuntabilitas (X1)	23.8372	4.23663	43
Transparansi (X2)	23.8837	4.30509	43

Correlations

	Penggunaan dana desa (Y)	Akuntabilitas (X1)	Transparansi (X2)	
Pearson Correlation	Penggunaan dana desa (Y)	1.000	.790	.819
	Akuntabilitas (X1)	.790	1.000	.943
	Transparansi (X2)	.819	.943	1.000
Sig. (1-tailed)	Penggunaan dana desa (Y)	.	.000	.000
	Akuntabilitas (X1)	.000	.	.000
	Transparansi (X2)	.000	.000	.
N	Penggunaan dana desa (Y)	43	43	43
	Akuntabilitas (X1)	43	43	43
	Transparansi (X2)	43	43	43

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.821 ^a	.673	.657	3.46500	1.711

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

b. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	990.262	42	495.131	41.239	.000 ^a
	Residual	480.250		12.006		
	Total	1470.512				

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

b. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	12.917	3.079	4.195	.000
	Akuntabilitas (X1)	.234	.378	.619	.539
	Transparansi (X2)	.908	.372	2.438	.019

a. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

Coefficient Correlations^a

Model		Transparansi (X2)	Akuntabilitas (X1)
1	Correlations	Transparansi (X2)	1.000
		Akuntabilitas (X1)	-.943
	Covariances	Transparansi (X2)	.139
		Akuntabilitas (X1)	-.133

a. Dependent Variable: Penggunaan dana desa (Y)

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

Petunjuk Pengisian

- a. Pilih salah satu dari 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya.
- b. Berilah tanda centang (✓) atau tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang bapak/ibu pilih.
- c. Jawaban yang bapak ibu berikan, akan dijamin kerahasiaannya.

Bobot penilaian:

(SL) Selalu	: 5
(SR) Sering	: 4
(KK) Kadang-kadang	: 3
(J) Jarang	: 2
(TP) Tidak pernah	: 1

Pertanyaan

Nomor Pertanyaan	AKUNTABILITAS (variabel X1)	Jawaban				
		SL	SR	KK	J	TP
1	Pemerintah desa patuh terhadap peraturan-peraturan terkait bidang keuangan dalam penggunaan dana desa					
2	Pemerintah desa mengutamakan efisiensi dalam menggunakan anggaran dana desa					
3	Pemerintah desa mengutamakan efisiensi dalam menggunakan sumber daya manusia					
4	Pemerintah desa mengusahakan pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup tugasnya dalam penggunaan dana desa					
5	Pemerintah desa mengusahakan tercapainya tingkat kesejahteraan sosial dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh					

	dana desa					
6	Pemerintah desa mengusahakan tercapainya tingkat ekonomi masyarakat dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa					

Nomor Pertanyaan	TRANSPARANSI (variabel X2)	Jawaban				
		SL	SR	KK	J	TP
1	setiap warga masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan mereka terkait penggunaan dana desa					
2	masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan di musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa terkait program yang dibiayai dana desa					
3	setiap warga masyarakat menyampaikan pandangan, pendapat, atau kritik, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa adanya ancaman atau pembatasan yang tidak proporsional.					
4	warga masyarakat diberi akses terhadap dokumen-dokumen kegiatan yang dibiayai dana desa					
5	tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan tentang penggunaan dana desa					
6	tersedia informasi yang dibutuhkan masyarakat yang mudah diakses dan tepat waktu tentang penggunaan dana desa					

Nomor Pertanyaan	PENGGUNAAN DANA DESA (VARIABEL Y)	Alternatif Jawaban				
		SL	SR	KK	J	TP
1	membangun infrastruktur fisik desa					
2	membangun keamanan dan ketahanan sosial warga dan komunitas desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum					
3	penyediaan lapangan pekerjaan dan menggali pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset desa maupun bantuan pendanaan dari pihak luar desa					
4	memperkuat akuntabilitas pemimpin desa, transparansi pengelolaan anggaran desa, responsivitas pemimpin, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan					
5	membangun kapasitas institusional desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan					
6	mengembangkan kerjasama, kepercayaan, solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat					
7	kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat kondisi masyarakat desa setempat dan dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama di seluruh desa					
8	dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik taraf hidup sosialnya maupun ekonominya					
9	pemberdayaan masyarakat lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dari aspek sosial dan ekonominya					
10	kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan masyarakat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dalam segala aspek kegiatan					

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

ABSTRACT

MUZDALIFAH ADNAN. S2121051. THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND GOVERNMENT TRANSPARENCY ON VILLAGE FUND UTILIZATION IN LUWOO VILLAGE, TELAGA JAYA SUBDISTRICT, GORONTALO REGENCY

This study aims to find the effect of accountability and government transparency on village fund utilization in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, Gorontalo Regency. This study employs a quantitative approach with a survey method. The sample size in this study covers 43 people. The data analysis technique used is simple linear regression analysis. The findings indicate that the effect of accountability (X1) and government transparency (X2) on village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, Gorontalo Regency is 0.673 (67.3%), and the remaining at 0.327 (32.7%) is affected by other variables outside this study. The effect of accountability (X1) on village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, Gorontalo Regency, is 0.619, and government transparency (X2) affects village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict at 2.438. It means that the variable of government transparency (X2) has the most dominant effect on village fund utilization (Y) in Luwoo Village, Telaga Jaya Subdistrict, compared to accountability.

Keywords: accountability, government transparency, village fund utilization



ABSTRAK

MUZDALIFAH ADNAN. S2121051. PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap penggunaan dana desa di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 orang. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,673 atau 67,3%, adapun sebesar 0,327 atau 32,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 0,619, sedangkan pengaruh transparansi pemerintah (X2) terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, yakni sebesar 2,438. Hal ini berarti bahwa transparansi pemerintah (X2) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penggunaan dana desa (Y) di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, dibanding pengaruh akuntabilitas.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi pemerintah, penggunaan dana desa





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 149/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Desa Luwoo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisvari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Muzdalifah Adnan

NIM : S2121051

Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Penelitian : Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa terhadap penggunaan dana desa di desa luwoo kecamatan telaga jaya kabupaten gorontalo

Lokasi Penelitian : Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal 25/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisvari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TALAGA JAYA
DESA LUWOO**

Alamat : Jl. Anjungan Teluk Aur Dusun II Desa Luwoo Kode Pos 96181

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 747/LW/22 /II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IBRAHIM RAHMAN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Luwoo
Alamat : Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : **MUZDALIFAH ADNAN**
Nim : S2121051
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah benar-benar telah melakukan dan menyelesaikan penelitian di Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo untuk penyusunan skripsi yang berjudul " Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemrintah Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuu, 21 Februari 2025
KEPALA DESA LUWOO

IBRAHIM RAHMAN, S.Pd



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 058/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN : 093004307
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MUZDALIFAH ADNAN
NIM : S2121051
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 18 % berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

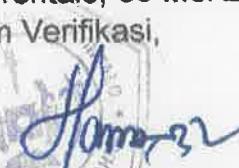
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 05 Mei 2025

Tim Verifikasi,


Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN. 0930048307

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

FISIP06 Unisan

Muzdalifah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Luwoo ...

 ILMU PEMERINTAHAN 1-2024

 Fak. Ilmu Sosial & Politik

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3163266767

74 Pages

Submission Date

Feb 23, 2025, 7:18 PM GMT+7

11,190 Words

Download Date

Feb 25, 2025, 7:15 PM GMT+7

75,252 Characters

File Name

SKRIPSI_MUZDALIFAH_ANAN_1.doc

File Size

1.0 MB

BIODATA MAHASISWA

Nama : Muzdalifah Adnan

Nim : S2121051

Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 Agustus 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah :-

Alamat : JL. durian

Kelurahan : Tomulabutao Selatan

Kecamatan : Dungingi

Provinsi : Gorontalo

Agama : Islam

Jurusan : Ilmu Pemeritahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Dungingi

SMP : SMP N.3 Gorontalo

SMA : SMA N.2 Gorontalo